

ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN PASCASERTIFIKASI DI KOTA SEMARANG

Endang Wuryandini

Mahasiswa Manajemen Pendidikan Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang
dyne64@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this research was conducted to identify the problems and needs of vocational teachers of business and management pascasertifikasi in Semarang for conducting sustainable professional development to improve professionalism. This study used a qualitative research approach. The subjects in this study were vocational teachers of Business and Management in Semarang Pascasertifikasi totaled 191 teachers consists of 77 teachers of Civil Servants (PNS) and 114 private teachers. Determination of the source of the data is done by sampling purposive. Technique of data gathering used are triangulation, in-depth interviews, documentation, and open questionnaire. Data analysis technique using data interaction analysis model is to collect the data, reducing the data, collate data reduction and data ferivikasi with Focus Group Discution (FGD). The results showed a small proportion of teachers have implemented the appropriate sustainable professional development minimum of credits score and most of the teachers have executed agreements but do not meet all the sub-elements of Sustainable professional development and credit score has not complied with the minimum of credits score required.

Keywords: *sustainable professional development; teacher; professionalism.*

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi tuntutan abad ke-21 agar mampu menjawab tantangan lokal, nasional, dan internasional dalam memenuhi kebutuhan Dunia Usaha dan /atau Dunia Industri (DU/DI). SDM berkualitas hanya dapat diperoleh dari guru profesional dan sekolah berkualitas. Sebagaimana Sahlberg (2007) menyatakan bahwa ekonomi modern dengan pasar tenaga kerja membutuhkan orang-orang dengan keterampilan, pengetahuan yang tidak dapat dikembangkan di sekolah yang berkualitas rendah. Diperkuat pendapat Ayhan (2011) bahwa hal yang sangat penting dalam perekonomian negara yaitu dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

Sekolah yang bisa menciptakan tenaga kerja di tingkat menengah adalah sekolah kejuruan. Vladimir Gasskov (2000:5), Clarke & Winch (2007:62) berpendapat bahwa Pendidikan kejuruan di SMK memberikan bekal kepada peserta didik dan menyiapkan untuk memasuki dunia kerja, baik dalam menciptakan usaha mandiri maupun memasuki peluang atau lowongan kerja yang ada. Diperkuat pendapat Pavlova (2009:7) tentang pendidikan kejuruan secara umum mengandung pengertian bahwa tujuan utama dari pendidikan kejuruan adalah persiapan untuk dapat langsung bekerja dan sebagai penyediaan pelatihan khusus yang reproduktif dan berbasis pada interaksi guru.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984) dalam Mukhidin dan Yetni Marlina (2012), bahwa “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau *in-school success standards* dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau *out-of school success standards*”. Slamet (2005:45-46) menambahkan bahwa idealisasi pendidikan kejuruan sangat jelas, yaitu pendidikan kejuruan akan efektif apabila dimulai dan diakhiri di Dunia Usaha / Dunia Industri.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil makna bahwa guru SMK dituntut mampu memberikan bekal kesiapan kerja berupa seperangkat keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk bekerja dalam pekerjaan kepada peserta didik. Sebagaimana Direktur PSMK (2012: 4-5) dalam proses pembelajaran di lingkup SMK pelaksanaan *Teaching Factory* diterapkan dalam berbagai bidang studi keahlian, diantaranya adalah Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen. *Teaching Factory* dapat dikatakan sebagai penggabungan dari pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan pembelajaran berbasis produksi, artinya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar konsumen. Selanjutnya Hadlock, Wells, Hall, Cliford, Winowich, dan Burns (2008:14) mengungkapkan bahwa *Teaching Factory* mempunyai tujuan menyadarkan bahwa mengajar siswa seharusnya lebih dari sekedar apa yang terdapat dalam buku dan hasil pembelajaran diukur berdasarkan kompetensi (*Competency Based Assesment*).

Pendidikan dalam upaya menyiapkan SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing menuntut guru untuk selalu mengembangkan profesionalitasnya melalui pendidikan dan pelatihan baik secara mandiri maupun kelembagaan. Hal ini sesuai hasil penelitian Douglas *et al* (2008), tentang pengaruh pelatihan dan pendidikan terhadap kemampuan guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Douglas melakukan penelitian dengan menggunakan model *pre-service* dan *in-service training*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua bentuk pelatihan terdapat korelasi positif antara pelatihan guru dengan produktivitas *output* dan guru yang berpengalaman lebih tampil efektif dalam mengajar. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas

menurut Zegwaard, Karsten E. dan Coll, Richard K. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Exploring some current issues for Cooperative Education*" yang dilakukan di New Zealand, menyimpulkan bahwa kunci sukses pendidikan adalah pada tanggung jawab terjalannya model kerjasama yaitu hubungan antara *stakeholders*, masyarakat, lembaga pendidikan, swasta, dan Pemerintah.

Salah satu gambaran profesionalitas guru dapat dilihat dari hasil tes uji kompetensi guru (UKG). Hasil uji kompetensi awal Guru SMK Tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pada peringkat ke 2 dengan nilai rata-rata 53,25 setelah Provinsi Bali dengan nilai rata-rata 56,62. Jawa Tengah berada pada posisi lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional 50,02 (Kemendikbud, 2012). Hasil UKG tersebut menunjukkan bahwa guru SMK di Jawa Tengah memiliki tingkat profesionalitas di atas rata-rata nasional. Profesionalitas sebagai bentuk tanggung jawab guru dalam menghasilkan SDM berkualitas tidaklah cukup dengan mengedepankan hasil yang diperoleh melalui UKG saja melainkan harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai bidang ilmunya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ipteks. Untuk itu pemerintah menetapkan regulasi baru melalui Permenegpan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, bahwa Guru terutama yang telah memiliki sertifikat pendidik diwajibkan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dengan diperhitungkan angka kreditnya sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Agar PKB mampu meningkatkan profesionalitas guru maka hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB mematuhi prinsip-prinsip berikut.

1. PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari.
2. Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah.
3. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu.
4. Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB.

5. Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi dan/atau seni, serta menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
7. PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan PKB harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/ kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat.
8. Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP) untuk menjaga relevansi kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar bepergian ke tempat lain.
9. PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa, dan sekaligus mendukung perubahan khusus di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel. (Kemendiknas, 1010: 18-19)

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga (Kemendikbud, 2012) Kegiatan PKB yang dilakukan guru mencakup tiga hal, yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Nomor	Sub Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Meliputi
1	Pengembangan Diri	1) Mengikuti diklat fungsional 2) Melaksanakan kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	1) Membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian 2) Membuat publikasi buku
3	Karya Inovatif	1) Menemukan teknologi tepat guna 2) Menemukan/meciptakan karya seni 3) Membuat/memodifikasi alat pelajaran 4) Mengikuti pengembangan, penyusunan, standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III a sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IVe wajib melaksanakan PKB sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.

Dari Jabatan	Ke Jabatan	Jumlah angka kredit minimum dari Sub Unsur	
		SubUnsur Pengembangan diri	Sub Unsur Publikasiilmiah dan/atau Karya inovatif
Guru Pertama Golongan III/a	Guru Pertama Golongan III/b	3 (tiga)	-
Guru Pertama Golongan III/b	Guru Muda Golongan III/c	3 (tiga)	4 (empat)
Guru Muda Golongan III/c	Guru Muda Golongan III/d	3 (tiga)	6 (enam)
Guru Muda Golongan III/d	Guru Madya Golongan IV/a	4 (empat)	8 (delapan)
Guru Madya Golongan IV/a	Guru Madya Golongan IV/b	4 (empat)	12 (dua belas)
Guru Madya Golongan IV/b	Guru Madya Golongan IV/c	4 (empat)	12 (dua belas)
Guru Madya Golongan IV/c	Guru Madya Golongan IV/d	5 (lima) wajib presentasi ilmiah	14 (empat belas)
Guru Madya Golongan IV/d	Guru Madya Golongan IV/e	5 (lima)	20 (dua puluh)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen yang profesional adalah guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D.IV, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan melaksanakan PKB sesuai bidang ilmu yang diampu dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional mulai dari Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III a sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IV e.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana PKB yang selama ini dilaksanakan Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Pascasertifikasi Di Kota Semarang. Rumusan tersebut dapat dirinci menjadi: (a) bagaimanakah sosialisasi/ pelatihan/ workshop PKB yang selama ini dilaksanakan, meliputi:

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (b) bagaimanakah pelaksanaan kegiatan PKB yang telah dilaksanakan guru, meliputi: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif; (c) bagaimanakah permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi guru dalam melaksanakan PKB; (d) bagaimanakah kebutuhan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan PKB yang sedang berlangsung, permasalahan dan kebutuhan guru SMK Bidang Keahlian Bisnis, serta Manajemen pascasertifikasi di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan PKB. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pengawas SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Kepala Sekolah SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, LPMP, dan LPTK sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru. Bagi guru dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi melaksanakan kegiatan PKB dalam pengembangan profesi dan karirnya secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan analisis data induktif (Moleong, 2004:34). Subjek dalam penelitian ini adalah Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Pascasertifikasi di Kota Semarang. Penetapan sumber data dilakukan dengan *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data triangulasi, *in-depth interview*, dokumentasi dan angket terbuka sebagai penunjang (Sugiyono, 2013:376). Teknik analisis data menggunakan Model Analisis Data Interaksi dari Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyusun hasil reduksi data serta verifikasi data melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKB Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Pasca sertifikasi di Kota Semarang harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui kerjasama dengan LPTK dan DU/DI dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan sesuai bidang ilmu yang diampu dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional mulai dari Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III a sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IV e.

A. Fakta Empirik

1. Perencanaan Sosialisasi/ Diklat/ Workshop PKB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs. Bym, dapat dijelaskan bahwa:

“Dalam menetapkan instruktur mempertimbangkan 1) Pengalaman kerja, 2) Riwayat pendidikan, 3) Curriculum vitae, 4) Pengalaman Organisasi, 5) Berprestasi, 6) Humoris, komunikatif dan responsif. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memastikan kesediaan nara sumber yang tepat dilakukan dengan 1) mengajukan permohonan kepada nara sumber, 2) mengirim TOR kegiatan kepada nara sumber, 3) menyediakan form kesanggupan menjadi nara sumber, 4) Secara periodik dan kontinu mengadakan komunikasi dengan nara sumber sebelum pelaksanaan, 5) dan apabila dalam waktu yang ditetapkan nara sumber tidak hadir, maka digantikan dengan nara sumber cadangan yang telah dipersiapkan sebelumnya (bisa dari Disdik atau panitia yang memiliki kompetensi sesuai; tempat pelaksanaan dan skedul dibuat oleh panitia. Untuk waktu pelaksanaan semaksimal mungkin disesuaikan waktu luang guru serta memberikan dukungan surat tugas kepada guru dan dukungan biaya sesuai anggaran”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Semarang Drs. ED, Ketua MGMP Akuntansi Drs. Sri Suwarno, M.Pd, dan Drs. Umar Said untuk bidang Pemasaran mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru penetapan tujuan sosialisasi/diklat/workshop menjadi acuan dalam penetapan nara sumber, waktu dan metode pelaksanaan, penetapan peserta dan biaya pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan hasil angket kepada guru diperoleh kesimpulan bahwa legalitas penyelenggara, persyaratan peserta, kejelasan tujuan, perencanaan materi dan nara sumber, serta tempat pelaksanaan dikatakan direncanakan dengan baik. Adapun untuk fasilitas yang akan diterima peserta dan sistem evaluasi yang akan dilaksanakan masih dikategorikan cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan adalah perencanaan yaitu tentang kejelasan fasilitas yang akan diterima peserta dan kejelasan sistem evaluasi. Fasilitas dan sistem evaluasi yang jelas akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan peserta selama mengikuti sosialisasi/diklat/workshop sedangkan kejelasan sistem evaluasi akan berpengaruh pada persiapan diri peserta dalam pencapaian keberhasilan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi/ Diklat/ Workshop Tentang PKB

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan sosialisasi/diklat/workshop tentang PKB berdasarkan wawancara Drs. Sri Suwarno, M.Pd selaku ketua MGMP Akuntansi, Drs. Marsana guru produktif Administrasi Perkantoran, dan Drs. Umar Said ketua MGMP Pemasaran serta hasil angket terbuka dari sebagian guru terkait dengan relevansi materi mengatakan bahwa relevansi materi dengan kebutuhan guru mengembangkan kompetensi pedagogik sangat baik. Relevansi materi dengan kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, pengembangan diri, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pengembangan kualitas pembelajaran dan relevansi dengan

permasalahan yang dihadapi guru pada kategori baik. Untuk relevansi materi dengan kompetensi menghasilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif dalam kategori cukup baik. Terkait dengan waktu pelaksanaan dan kesempatan guru agar dapat mengikuti dan tidak mengganggu tugas pembelajaran serta kontinuitas pelaksanaan dalam kategori cukup baik. Selanjutnya terkait dengan nara sumber, yaitu kepakaran, kemampuan berkomunikasi, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan diklat dikatakan baik, sedangkan untuk pemilihan metode pelatihan dalam kategori cukup baik.

Temuan penelitian tentang pelaksanaan sosialisasi/diklat/workshop tentang PKB bahwa kepakaran instruktur dan relevansi materi dalam pengembangan kompetensi guru dalam melakukan publikasi ilmiah dan karya inovatif perlu ditingkatkan dengan menghadirkan instruktur yang pakar dalam keilmuan dan telah benar-benar melaksanakan praktik kegiatan tersebut sehingga mampu memberikan contoh dan solusi yang tepat untuk permasalahan guru. Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan publikasi ilmiah dan karya inovatif perlu direncanakan sesuai dengan waktu luang guru secara berkesinambungan serta dilaksanakan dengan metode pelatihan terbimbing dan pendampingan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi/ Diklat/ Workshop

Hasil penelitian tentang sistem evaluasi dalam pelaksanaan sosialisasi/diklat/workshop PKB, dikatakan bahwa kesesuaian tes formatif dengan kompetensi yang akan dikembangkan, kesesuaian evaluasi selama proses dan soal evaluasi sumatif dengan kebutuhan PKB bagi guru dikategorikan baik. Selanjutnya mengenai obyektivitas dalam melaksanakan penilaian terhadap peserta dalam kategori cukup baik. Oleh karena itu dalam menetapkan system evaluasi harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dan pengembangan materi selama sosialisasi/ diklat/workshop berlangsung.

B. Pelaksanaan Kegiatan PKB Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen

Pelaksanaan PKB meliputi pelaksanaan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif dalam tiga tahun terakhir (TS-3).

1. Pengembangan Diri

Berdasarkan angket diperoleh data bahwa rata-rata guru dengan jabatan Guru Madya, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV a melakukan pengembangan diri melalui diklat fungsional 2 x dengan pola 30 s.d 80 jam dan melalui kegiatan kolektif guru yaitu mengikuti lokakarya melalui MGMP/KKG dan menjadi peserta dalam kegiatan ilmiah rata-rata 2 x serta kegiatan kolektif lainnya rata-rata 1 x.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata guru melaksanakan diklat fungsional dengan perolehan angka kredit $2 \times (1) = 2$

dalam 3 tahun. Kegiatan kolektif dengan menjadi peserta dalam kegiatan ilmiah melalui MGMP/KKG diperoleh angka kredit $2 \times (0,1) = 0,2$ dan kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban rata-rata memperoleh angka kredit 0,1. Perolehan angka kredit pada unsur pengembangan diri secara keseluruhan dalam 3 tahun rata-rata berjumlah 2,3. Jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal angka kredit 4 dari Guru Madya/Pembina/IVa ke Pembina Tk I/IVb maka perolehan angka kredit selama 3 tahun belum memenuhi persyaratan angka kredit minimal.

2. Publikasi Ilmiah

Hasil penelitian tentang pelaksanaan publikasi ilmiah dalam 3 tahun terakhir diperoleh data bahwa guru rata-rata melakukan presentasi pada forum ilmiah sebagai pemrasaran 1X, sebagian kecil guru membuat artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dimuat di media tingkat provinsi, kabupaten/kota sebanyak 1X, membuat buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber ISBN 1X, membuat buku pelajaran dicetak penerbit tidak ber ISBN, membuat modul di tingkat kabupaten/kota dengan pengesahan Kepala Dinas 2 X. Sebagian kecil guru yang mampu membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya dan dipublikasikan melalui jurnal tingkat kabupaten/kota 1X dan sebagian lagi disimpan di perpustakaan 2X, serta membuat makalah berupa tinjauan ilmiah bidang pendidikan tidak diterbitkan tetapi disimpan di perpustakaan 1X.

Perolehan angka kredit dari pemrasaran adalah 0,2; membuat artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal memperoleh angka kredit 1,5 dan membuat buku pelajaran dicetak penerbit ber ISBN dengan angka kredit 3 dan tidak ber ISBN dengan angka kredit $2 \times (1) = 2$. Selanjutnya laporan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal tingkat Kabupaten/Kota memperoleh angka kredit 1 dan yang diseminarkan kemudian disimpan di perpustakaan sekolah memperoleh angka kredit 4.

Karya inovatif yang telah dilakukan sebagian kecil guru yaitu membuat alat pelajaran kategori sederhana 1X memperoleh angka kredit 1, membuat alat peraga kategori kompleks dan sederhana 2X dengan angka kredit $2 \times 2 = 4$, serta mengikuti kegiatan penyusunan standar, pedoman, penyusunan soal tingkat provinsi 1X memperoleh angka kredit 1.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif yang telah dilakukan sebagian kecil Guru Madya/Pembina/IVa ke Pembina Tk I/IVb memperoleh angka kredit 17,7 dalam kategori memenuhi kebutuhan angka kredit minimal. Guru yang melaksanakan kegiatan PKB memiliki kualifikasi S2. Hal ini menunjukkan bahwa studi lanjut akan membawa dampak positif pada peningkatan kompetensi melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian dan karya inovatif.

C. Permasalahan Guru dalam Kegiatan PKB

Permasalahan yang dihadapi Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Pascasertifikasi Di Kota Semarang dalam pelaksanaan kegiatan PKB antara lain dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Ketua MGMP, Kepala Sekolah dan Guru bahwa: 1) Guru memiliki karakteristik yang berbeda (individu dan lingkungan), 2) Belum sepenuhnya kegiatan sosialisasi/ diklat/workshop tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah dapat diikuti oleh semua guru. 3) Diklat/workshop tentang PKB di Kota Semarang dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia, 4) penugasan guru sering tidak berkelanjutan sehingga guru memperoleh pemahaman secara parsial. 5) Kurangnya kesiapan dan komitmen guru dalam mengikuti kegiatan PKB, 6) Guru membandingkan konsekuensi finansial kegiatan PKB dengan sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga berdampak pada kurangnya motivasi melaksanakan kegiatan PKB, 7) metode pelatihan dan workshop dinilai masih kurang tepat.

Berdasarkan temuan tersebut maka diperlukan upaya meningkatkan motivasi, kesediaan dan komitmen Guru dalam melaksanakan kegiatan PKB baik secara internal dan eksternal. Faktor internal guru berupa kesadaran untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab, kesediaan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan profesi. Faktor eksternal dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran pengembangan profesi guru, kerjasama Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan lembaga sertifikasi profesi, organisasi profesi, LPTK dan DU/DI dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan.

D. Kebutuhan Guru dalam Kegiatan PKB

Kebutuhan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Ketua MGMP, Kepala Sekolah, Guru, data dokumen penilaian kinerja, dan isian angket terbuka didapat temuan bahwa: 1) penugasan guru untuk mengikuti pelatihan/workshop diharapkan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga guru memperoleh pemahaman yang utuh, 2) materi pelatihan diberikan oleh instruktur yang benar-benar pakar dalam keilmuan dan telah melaksanakan kegiatan PKB khususnya dalam publikasi ilmiah dan karya inovatif sehingga dapat memberikan penjelasan praktik tidak sekedar teoritis, 3) pelatihan/ workshop dilaksanakan tidak pada hari efektif. 4) Dilaksanakan pendampingan secara berkala sampai guru benar-benar mampu melaksanakan secara mandiri.

SIMPULAN

Kegiatan PKB meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif pada Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen merupakan upaya meningkatkan profesionalitas Guru agar dapat menghasilkan SDM berkualitas. Lulusan SMK disebut sebagai SDM berkualitas apabila memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DU/DI atau pasar kerja. Hal ini dapat ter-

wujud apabila guru dapat melaksanakan pembelajaran berbasis *teaching factory* dan melaksanakan evaluasi belajar berdasarkan kompetensi (*Competency Based Assesment*). Kompetensi guru dalam melaksanakan *teaching factory* dan *compe- tency based assesment*) dapat dikembangkan melalui kegiatan PKB. Agar kegiatan PKB berjalan dengan baik diperlukan: 1) Pembentukan lembaga atau organisasi yang khusus menangani kegiatan PKB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan, 2) Pelatihan/ workshop/ pendampingan diberikan oleh instruktur yang memiliki kepakaran sesuai bidang ilmu, baik teori maupun praktik. 3) Dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan Kota Semarang, LPTK, LPMP, Sekolah, Organisasi Profesi, Guru dan DU/DI dalam penetapan kebutuhan guru dalam PKB, materi, instruktur, fasilitas, metode, sistem evaluasi, waktu, dan Sistem pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayhan, S.C. 2011. *Why turkish student prefer to attentin vocational schools*. Istambul,turkey. <http://www.europeanjournalofscientificresearch.com>
- Clarke, L and Winch, C. 2007. *Vocational Education International Approach, Development and System*. New York: Routledge
- Direktorat Pembinaan SMK. 2011. Data Pokok SMK. Kementrian Pendidikan Nasional, p1. <http://datapokok.ditpsmk.net?index.php/aksi=12&page=3>
- Gasskov, Vladimir. 2000. *Managing Vocational Training System: Hand Book For Senior Administrator*, Geneva: International Labour Office.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemendiknas, 2010. *Tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*
- Kemendikbud, 2012. *Tentang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*
- 2012. *Tentang Hasil Uji Kompetensi Awal Guru*
- Pavlova, M. 2009. *Technology and vocational education for assustainable development empowering individuals for the future*. Bonn: Spinger Science Business Media.
- Sahlberg. 2007. *Secondary education in OECD countries*. Brasilia. Brazil. www.europeantrainingfoundation.co
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
-2013. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet PH. 2005. *Pengembangan Kapasitas Untuk Mendukung Desentralisasi Pendidikan Kejuruan*. Yogyakarta: Naskah Pidato, Pengukuhan Guru Besar

dalam Bidang Ilmu Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Fakultas Teknik UNY.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.